

Panas Dingin Kehidupan Keberagaman Kawasan Asia Selatan (Dari Masa Dinasti Mughal Hingga Kontemporer)

Fikri Surya Pratama¹, Jupri²

^{1,2} UIN Imam Bonjol Padang

fikrisurya28@gmail.com, juprijupri983@gmail.com

Abstract

The South Asian region itself is an area that has a history of people who aren't free from conflict. This happens because disorganized of the diversity of society consisting of various races and religions. Islam which had triumphed in this region from the 8th century to the 18th century AD was enough to color the cultural life of the people of South Asia. This article aims to explain how the history and development of Muslim societies in South Asian countries from the Mughal Dynasty to the contemporary. The method used in this research is the historical research method, with the steps: 1) Heuristics or collection of sources collected through library research by searching for books, previous research journals and popular news sites that update on the situation of Muslims in the South Asian region; 2) Source Criticism, namely the activity of selecting sources based on their strengths; 3) Interpretation or research analysis stage; 4) historiography or the last stage of this research in the form of historical scientific writings. The results of the study show that countries such as India and Sri Lanka have quite complicated racial issues in their religious communities. Bangladesh, Afghanistan and Pakistan, which are Muslim-majority countries, are confused with their internal and political problems with India. The Maldives is able to become a good Muslim model country in the South Asian region, as well as good tolerance for Bhutan and Nepal which have Muslim minorities.

Keywords: Conflict, Muslim, South Asia.

Abstrak

Kawasan Asia Selatan sendiri merupakan wilayah yang memiliki sejarah masyarakat yang tak lepas dari konflik. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terorganisir keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras dan agama. Islam yang sempat berjaya di kawasan ini sejak abad ke-8 hingga abad ke-18 M cukup mewarnai corak kebudayaan kehidupan masyarakat Asia Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan masyarakat muslim di negara-negara Asia Selatan dari masa Dinasti Mughal hingga kontemporer. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, dengan langkahnya: 1) Heuristik atau pengumpulan sumber yang dikumpulkan lewat studi pustaka dengan mencari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan situs berita populer yang update mengenai situasi umat Muslim di kawasan Asia Selatan; 2) Kritik Sumber yakni kegiatan menyeleksi sumber-sumber berdasarkan kekuatannya; 3) Interpretasi atau tahap analisis penelitian; 4) historiografi atau tahap terakhir penelitian ini berupa karya tulis ilmiah sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya negara-negara seperti India dan Sri Lanka memiliki persoalan rasial yang cukup rumit dalam umat beragamanya. Bangladesh, Afganistan dan Pakistan tang menjadi negara mayoritas muslim dipusingkan dengan persoalan internal negara dan politik mereka dengan India. Maladewa mampu menjadi negara percontohan muslim yang baik di kawasan Asia Selatan, serta toleransi yang bagus juga pada Bhutan dan Nepal yang memiliki kelompok minoritas muslim.

Keywords: Konflik, Muslim, South Asia.

Pendahuluan

Komposisi demografis umat Islam di Asia Selatan berasal dari berbagai macam latar belakang ras dan hidup dalam keberagaman lingkungan, dan menghadapi kehidupan sosial dan ekonomi yang berbeda-beda (Eposito, J. L., 2002). Termasuk juga kehidupan dengan umat agama yang lain. India walaupun bukan negara mayoritas muslim, namun dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, India menaruh angka muslim tertinggi ke-3 di dunia dengan persentase 10% dari jumlah populasi penduduk di India. Negara-negara yang meliputi kawasan Asia Selatan sendiri terdiri dari: Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa dan Sri Lanka. India sendiri sebagai negara yang terbesar di kawasan Asia Selatan tentu mempunyai pengaruh dalam pembentukan aspek kehidupan masyarakat di kawasan ini, terutama Pakistan yang memerdekakan diri dari India dan Bangladesh yang memerdekakan diri dari Pakistan. Maladewa dan Sri Lanka dua negara kepulauan di Selatan India (Samudera Hindia) juga sedikit banyak dipengaruhi kebudayaan India dalam aspek kehidupan masyarakatnya.

Di India juga banyak lahir agama-agama yang cukup besar di dunia seperti Hindu (yang sangat besar pada India) dan Buddha (yang sangat besar sekarang pada Nepal, Bhutan dan Sri Lanka), dan agama yang cukup berkembang di India dan kawasan sekitarnya seperti Sikh dan Jain. Serta Islam (Mayoritas pada Afghanistan,

Pakistan, Bangladesh dan Maladewa; Minoritas pada India, Sri Lanka; dan sangat kecil jumlahnya pada Nepal dan Bhutan) yang memasuki India dan cukup memiliki pengaruh dengan lahirnya kerajaan besar seperti Dinasti Mughal pada sekitar abad ke-7 M (Supardi., 2008).

Agama dan budaya bisa menjadi suatu akar permasalahan yang rumit ketika memberikan dampak hirizontal di masyarakat, ketika terjadinya *misscommunication* antara satu etnis, budaya atau kelompok, maka konflik tidak dapat dihindarkan. Konflik ini bisa dibumbui dengan isu globalisasi, ekonomi, politik, persoalan internal domestik, kondisi sosial budaya, perbedaan penafsiran antar agama dan budaya, dan lain sebagainya yang akan menyebabkan problem-problem fundamentalisme, seperti konflik antar agama, konflik etnis, serta ketegangan budaya (GA, M., 2004)

Adapun keragaman yang mewarnai masing-masing individu pada masyarakat multikultural adalah perihal hubungan sosial. Multikultural mempunyai pesna yakni keharmonisan, kesetaraan dan menerima adanya perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama kelompok lain (Abdullah, Mh., 2006). Kemajemukan etnis, suku atau apapun itu adalah merupakan gambaran perubahan sosial budaya masyarakat yang saling bekerja sama juga saling menghargai satu sama lainnya.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Fisher, S. (2000:7) Salah satu sebab terjadinya konflik menyebutkan bahwa

timbulnya konflik karena beberapa hal, yaitu:

1. Teori hubungan masyarakat; konflik disebabkan oleh polarisasi masyarakat yang terus terjadi, menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Hal ini bisa kita lihat pemecahan kelas yang terjadi di India akan menimbulkan konflik bukan hanya muslim melawan ummat Hindu, tapi juga dalam masyarakat Hindu itu sendiri. Polarisasi ummat beragama non-Buddha di Sri Lanka juga menyebabkan perang saudara yang cukup lama.
2. Teori negosiasi konflik: konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Untuk kawasan Asia Selatan konflik semacam ini tidak hanya dirasakan secara internal, namun juga secara regional, terutama India dan Pakistan.
3. Teori kebutuhan manusia: konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi.
4. Teori identitas: konflik disebabkan identitas yang terancam, seperti hilangnya suatu hal yang penting atau persoalan dendam masa lalu. Kisruh sosial antara Hindu-Islam di India dilihat sebagai bentuk respon kontinuitas panjang atas tidak toleransinya raja-raja Mughal selepas Raja Akbar terhadap ummat non-muslim.
5. Teori kesalahpahaman antarbudaya: konflik terjadi karena *misscommunication* antar budaya yang berbeda.

6. Teori transformasi konflik: konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya, dan ekonomi.

Kawasan Asia Selatan sendiri merupakan wilayah yang memiliki sejarah masyarakat yang tak lepas dari konflik. Hal ini terjadi dikarenakan keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras yang memiliki keturunan, bahasa, kebudayaan, dan kepercayaan yang saling berbeda antara satu sama lain. Kekuatan politik yang cenderung memihak kelompok mayoritas juga menjadi persoalan yang menyebabkan konflik di kawasan ini. Namun, Kita tidak bisa mengeneralisir negara mayoritas muslim akan damai dan negara minoritas muslim akan menindas kelompok muslim. Semua ini kembali pada masyarakat dan pemerintah dalam membuat kebijakan menanggapi keberagaman ini.

Melihat hal ini, sangat sulit kiranya untuk mencapai persatuan yang juga diperparah kisruh politik antar negara di kawasan ini. Islam yang sempat berjaya di kawasan ini sejak abad ke-8 hingga abad ke-18 M cukup mewarnai corak kebudayaan kehidupan masyarakat Asia Selatan. Berangkat dari permasalahan ini, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan umat muslim di kawasan Asia Selatan dalam menghadapi pancaroba konflik dalam kehidupan keberagaman ini.

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah.

Menurut Gottschalk L (1986:35) metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat pengumpulan sumber. Sumber yang dikumpulkan ini dilakukan lewat *library research* dengan mencari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan situs berita populer yang menjelaskan *update* terbaru mengenai situasi umat Muslim di kawasan Asia Selatan; 2) Kritik Sumber yakni kegiatan menyeleksi sumber-sumber berdasarkan kekuatannya, perlu dilihat dari sudut pandang sumber yang didapatkan dalam menjelaskan sejarah dan perkembangan kehidupan umat Muslim di Asia Selatan; 3) Interpretasi atau tahap analisis ini sudah terjadi bisa saat awal penelitian maupun saat proses analisis pasca penelitian berlangsung; terakhir 4) historiografi atau tahap terakhir penelitian ini berupa karya tulis ilmiah sejarah.

Pembahasan

1. Kondisi Kehidupan Keberagaman pada Wilayah Masa Kekuasaan Mughal

Ekspansi Dinasti Mughal terhadap sebagian besar kawasan Asia Selatan sejak tahun 1529 membawa upaya penyatuan keberagaman sosial dalam satu payung Mughal, dimana pada masa Raja Akbar, kawasan Mughal mencapai masa keemasannya (Supardi., 2008:4-8). Masuknya Islam ke kawasan Asia Selatan juga membawa angin segar pada keberlangsungan kehidupan umat Hindu yang berada pada kasta bawah. Hindu sendiri menerapkan sistem kasta dalam kehidupan sosial dan beragamanya. Islam yang tidak mengenal kasta dalam ajarannya diterapkan oleh Dinasti Mughal untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, sehingga para masyarakat yang tergolong kelas rendah dalam ajaran

tahap, yakni: 1) Heuristik atau

Hindu akan mendapatkan hak sosial, ekonomi dan politik yang sama di bawah naungan Dinasti Mughal. Beberapa kasus pasca transformasi sosial ini mendapatkan orang-orang yang berada di kasta Hindu bisa memiliki prestasi secara ekonomi, politik dan militer pada masa Dinasti Mughal ini. Dinasti Mughal juga membawa angin segar pada persoalan gender, terutama masalah wanita yang kerap mendapatkan posisi yang diskriminatif pada kalangan Hindu. Pada masa Dinasti Mughal, Upaca Sati (pembakaran perempuan yang ditinggal mati suaminya) mulai terkikis dengan masuknya Islam ke kawasan Mughal. Walau demikian masih terdapat juga praktik-praktik Upacara Sati masih dilakukan, walau dengan jumlah yang tidak banyak lagi (Supardi, 2008: 4-8).

Sultan Akbar juga mengupayakan menjaga keberagaman dalam kehidupan kerajaannya. Sultan Akbar kerap melakukan politik akomodasi dengan umat Hindu dalam persoalan politik Mughal. Sultan Akbar melakukan kebijakan seperti penghapusan *jizyah*, larangan penyembelihan sapi, serta mengangkat beberapa tokoh penting Hindu yang ia percayai untuk menduduki kursi kementerian dan pemimpin pasukan perang. Sultan Akbar juga membuat konsep ajaran agama baru yakni Din Illahi pada tahun 1582 (Schuberg, L. 1983:162). Peninggalan Din Illahi ini juga sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan beragama masyarakat Asia Selatan terutama di India. Din Illahi dibuat oleh Sultan Akbar berdasarkan dari mayoritas unsur keagamaan Hindu dan Islam, serta beberapa aspek keagamaan Kristen, Jainisme dan Zoroasternisme (Faidi, A., 2020:162). Namun pada akhirnya, niat untuk membentuk lingkungan masyarakat yang harmonis justru menimbulkan perpecahan akibat paham Din Illahi. Din Illahi tidak berkembang baik dan hanya diikuti belasan pejabat yang dekat

dengan Akbar, Para pemuka agama Islam Kerajaan Mughal dan memberontak pada Akbar hingga masa berakhirnya kepemimpinan Akbar (Amin, H. A., 1999:261-262). Jika dilihat, langkah Akbar memiliki maksud politik untuk keberlangsungan posisinya, dan disisi lain seperti salah tafsir ajaran Islam yang dimana Sultan Akbar salah dalam penerapan konsep toleransi itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Sultan Akbar juga membebaskan para misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen di tanah Mughal (Supardi).

Kebijakan Sultan Akbar ini sempat dirubah karena perbedaan Sikap yang ditunjukkan penerusnya yakni Sultan Jahangir pada 1627 yang akhirnya meninggalkan konflik sosial yang berbau permasalahan umat agama. Kedua anaknya yakni Shah Jahan dan Azaf Khan memperbutkan tahta ayahnya, kemudian dimenangkan oleh Syah Jahan. Syah Jahan sendiri meneruskan strategi yang pernah diterapkan oleh kakeknya yakni Sultan Akbar dalam membina sosial, budaya, ekonomi dan politik Mughal. Shah Jahan digantikan oleh anaknya yang bernama Aurangzeb yang memiliki kebijakan yang berbeda dengan Sultan Akbar dan Shah Jahan dalam menyikapi perbedaan. Selain dipusingkan dengan mulai masuknya orang-orang Eropa ke wilayah Mughal seperti Portugis dan Inggris, Aurangzeb menghidupkan kembali *jizyah* dan terkadang bertindak keras terhadap Ummat Hindu. Aurangzeb melarang umat Hindu untuk membangun kuil-kuil tempat ibadah mereka, dan Aurangzeb memberikan jumlah pajak yang sangat besar dan memberatkan pada umat Hindu. Tanpa disadari, inilah yang menyebabkan kewibawaan Mughal mulai terkikis di mata masyarakat umat agama lain, terutama Hindu yang jumlahnya cukup mendominasi di kawasan Asia Selatan ini (Erwin, T. N. 1990:42).

Kekuatan Mughal kian berkarat dengan anak-anak Aurangzeb yang saling berebut

kekuasaan, Barat yang sudah menanamkan pengaruhnya, serta beberapa pemberontakan umat agama seperti Hindu dan juga umat Sikh yang merupakan perpaduan ajaran Islam dan Hindu pada masa Sultan Bahadur Shah tahun 1707-1712 M. Selepas masa Bahadur Shah, Mughal bisa dikatakan tidak lagi mengalami perkembangan karena sibuk dengan konflik internal dan melawan invansi pengaruh Barat (Supriadi).

2. Kondisi Kehidupan Komunitas Muslim Luar Kawasan Politik Mughal

Teruntuk kawasan **Sri Lanka** yang memang terpisah secara daratan dengan India, negara yang memang dikuasai secara sosial dan politik oleh umat Hindu dan Buddha sejak dahulu memang jarang terjamah oleh kekuatan Mughal, sehingga umat Islam sendiri pada akhir 2020 sendiri lebih kurang hanya mencapai 10% populasi. Melihat sejarah bagaimana sebenarnya Islam sudah cukup berkembang sejak abad ke-7 dikarenakan lokasi Sri Lanka yang menjadi lalu lintas perdagangan Arab ke Asia Tenggara, namun sejak kedatangan Portugis pada tahun 1505 mulai meluluhlantakkan umat muslim di sana hingga menjadi minoritas yang sedikit (Rasyid, S. 2010: 206).

Dilasir dari Republika.id mengenai demografi **Bhutan**, kawasan ini sendiri secara rasial lebih mendekati orang Asia Timur dan memiliki Buddha sebagai mayoritas agama mereka sejak dahulu, hal ini dikarenakan pengaruh Mughal sendiri sangat lemah dan bisa dikatakan tidak samapi ke Bhutan. Bhutan sendiri memiliki sifat yang sedikit tertutup dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional masyarakat mereka. Eksistensi minoritas muslim Bhutan sendiri baru tampak pada tahun 1989. Walaupun menjadikan Buddha sebagai agama resmi mereka, namun Bhutan tak melarang penduduknya untuk memeluk agama lain. Kebebasan dalam hak individu seperti berdakwah mulai didapatkan minoritas Hindu Bhutan secara de facto, namun muslim masih belum memilikinya.

Muslim memang memiliki hak untuk bekerja dan sebagai warga negara dan beribadah, tetapi kegiatan dakwah masih belum diizinkan. Walau muslim tak berkembang pesat disana, namun mereka masih menyatakan nyaman tinggal di Bhutan walau sebagai kelompok minoritas .

Mengenai **Nepal**, ummat Islam mulai memasuki Nepal sejak para rombongan Muslim Kashmir memasuki Nepal pada tahun 1482 dan disambut baik oleh Raja Ratna Malla, saat itu Nepal merupakan Kerajaan Hindu. Pada masa Dinasti Malla, umat muslim diakui keberadaannya dan banyak yang menetap di wilayah Terai (kawasan perbatasan) dan Sunsari. Kondisi damai ini berubah pada kepemimpinan Perdana Menteri Jung Bahadur bersama Kolonial Inggris di Nepal. Hal ini juga diperburuk dengan terbitnya UU pada 1853 menyatakan umat muslim adalah warga negara dengan kasta terendah. Tekanan pada muslim mulai berangsur mereda pada sejak tahun 1960, dimana UU diskriminatif dicabut. Namun pemerintah Nepal masih melarang perpindahan agama dari Hindu ke Islam. Dilansir dari Merdeka.com Ummat Islam bila ketahuan melakuakn dakwah, maka akan dipenjarakan selama 3 tahun. Ummat muslim menaati peraturan ini, walau secara diam-diam mereka melayani orang-orang yang ingin muallaf, namun mereka tidak berdakwah saat masa-masa itu. Kondisi ummat Islam mulai membaik ketika mereka sangat sukses pada bidang perdagangan dan adanya perubahan perundangan-undnagan Nepal pada tahun 1990 untuk mengakui komunitas muslim Nepal.

Untuk kawasan Nepal sendiri, hingga tahun 2020 muslim mencapai angka 10% dari jumlah penduduk, diamna mereka adalah orang-orang India, Kashmir, Tibet, dan muallaf Nepal. Kehidupan muslim Nepal juga tidak dihantui isu diskriminasi dikarenakan pembentukan negara dari Kerajaan Hindu menjadi demokrasi pada tahun 1990, sehingga

sangat menjamin hak kehidupan dalam keberagaman. Pada tahun 1991 sendiri, Muslim sudah bisa mengikuti pemilu dan berhasil terpilih 5 orang muslim untuk tergabung dalam kongres Nepal dan kabinet. Ummat muslim dapat merayakan hari besarnya dan bisa membangun masjid-masjid di Nepal. Dilansir dari Republika.Id Ummat muslim juga berkontribusi besar pada pembangunan fisik dan sosial Nepal. Nepal menjamin kebebasan ummat Islam dalam berdakwah bahkan sudah terbentuk pesatuan muslim Nepal di sana atau Islam Sangh.

Dansir dari Pikiranrakyat.com Nepal juga melihat masjid sebagai salah satu simbol keberagaman dan toleransi yang baik di negaranya, seperti yang disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan, Pariwisata dan Penerbangan Sipil Nepal, Yogesh Bhattarai. Nepal meihat melindungi hak ummat beragama meruoakan salah satu kewajiban pemerintah pada rakyatnya. Pemerintah Nepal juga sudah mulai memberikan suntikan dana untuk pemugaran Masjid Pancha Kashmiri Takiya yang sudah ada sejak abad ke-15 M saat masa kekuasaan Raja Ratna Malla dan masjid-masjid yang muncul pada masa Raja Pratap Malla.

Untuk **Maladewa**, berdasarkan catatan Ibnu Batutah, Islam sudah ada di Maladewa sejak abad ke-12 M lewat intensnya pedagang Arab, Gujarat dan Mughal yang melintasi wilayah kepulauan ini, dan berhasil mengislamkan raja waktu itu yang berganti nama menjadi Muhammad El Adil, dimana raja-raja sebelumnya merupakan agama Buddha. Dilansir dari Republika.id Sistem kesultanan sempat dibekukan masa penjajahan Inggris di Maladewa. Pasca tiga tahun meredeka dari penjajahan Inggris pada 26 Juli 1965, Maladewa menghapus sistem kesultanan dan menjadi republik.

Dilansir dari Republika.id maladewa pasca kemerdekaan terus memantapkan Islam sebagai identitas politik, kemasyarakatan dan

budaya mereka. Islam yang sudah diresmikan sebagai agama resmi negara dan melarang masyarakat Maladewa untuk mengamalkan ajaran agama lain. Hal ini diksecualikan untuk orang asing non-muslim, dimana mereka diperbolehkan untuk menjalankan ibadahnya namun harus dilaksanakan secara privasi tidak boleh mengajak masyarakat maladewa untuk berpartisipasi.

3. Kondisi Pemberdayaan Kehidupan Keberagamaan Kawasan Asia Selatan Kontemporer

Walau sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar nomor tiga di dunia, muslim India sendiri masih tergolong minoritas dibanding ummat Hindunya yang mencapai angka 81% dari populasi India. Konstitusi India berupaya untuk menjaga stabilitas kehidupan ummat beragama ini. Sejak 1957, India yang mengadopsi paham sekuler dengan model modern dan liberla mulai memberikan komunitas muslim untuk maju di kursi legislatif walau masih dalam jumlah persentase yang kecil. Pasal 14 konstitusi India juga menjamin kebebasan dalam menetapkan kehidupan beragamanya, pemerintah tidak akan mengambil retribusi dari kegiatan keagamaan, serta tidak mewajibkan seremonial peribadatan tertentu dalam sekolah-sekolah negeri. Walau sebenarnya, ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada masa Mughal, seperti larangan penyembelihan sapi. Tentunya berbeda dengan Pakistan yang dimana hukum dan undang-undnag negaranya disandarkan pada hukum Islam (Qadafy M.Z., 2015:6-7).

Namun walau mayoritas berpenduduk muslim, tak menjamin kehidupan masyarakat Paksitan sendiri akan sejahtera. Bahkan di kawasan mayoritas muslim juga terdapat kesenjangan seperti halnya yang terjadi antara Provinsi Paksitan Barat dengan Paskistan Timur. Wilayah Barat sendiri mengalami keuntungan karena menjadi pusat pembangunan peradaban dan politik Pakistan. negara, terdapat kontradiksi yang diamalkan dalam suatu negara di kawasan Asia Selatan

Berbeda yang dialami wilayah Timur, segala kesenjangan terjadi pada bidang sosial, hak politik, kekerasan militer, ekonomi bahkan hingga pada persoalan budaya seperti penggunaan Bahasa Urdu yang juga diterapkan di Timur, dimana suku Bengal akan merasa terdiskriminasi. Hal ini tentu akan memunculkan perpecahan dengan hasil akhir lahirnya Bangladesh lewat perjuangan Mujiburrahman dalam memisahkan wilayah Paksitan Timur menjadi negara yang merdeka dan berpenduduk mayoritas Muslim (Hadi, A. A., 2018).

Untuk kawasan Sri Lanka sendiri, kehidupan sosial pada masyarakatnya hingga tahun 2009 diwarnai dengan perseteruan dua ummat agama yang juga dilandasi perbedaan ras, yakni antara Pemerintah Sri Lanka melawan gerakan *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) yang dimenangkan oleh pihak pemerintah Sri Lanka. Konflik ini sudah ada sejak Sri Lanka masih dalam penjajahan Inggris dan berakhir pada tahun 2009. LTTE yang India mewakili ras Tamil mencoba memisahkan diri dan membangun negara Tamil yang merdeka. Konflik etnis Sri Lanka Sinhala yang memang mayoritas Buddha dengan Tamil yang asalnya dari India dan beragama Hindu terus mewarnai konflik rasial dan politik dalam Perang Eelam ini. Konflik ini diselesaikan secara militer pemerintah mengalahkan LTTE, kemudian melaksanakan kebijakan politik yaitu membentuk daerah otonomi pada wilayah Timur dan untuk warga Tamil pada kawasan Utara Sri Lanka. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat pasca konflik ini, pemerintah Sri Lanka bersama UNDP membentuk program *Country Programme Action Plan* untuk memperbaiki aspek sosial dan ekonomi baik masyarakat asli Sri Lanka maupun etnis Tamil (Gayatri, N. E. T. Dkk, 2018:1-11).

Terdapat analisa menarik yang bisa kita lihat disini bagaimana jika kita kaitkan dengan paham negara dan agama mayoritas suatu ini (Kartini, I., 2012). Kita lihat bagaimana India yang memilih faham demokrasi juga

sedikit mementingkan ajaran Hindu dalam hukum mengenai larangan penyembelihan sapi tersebut, sehingga Muslim juga harus mengikuti regulasi ini. Begitu juga Sri Lanka, dimana ajaran Buddha yang menganjurkan perdamaian dan non-militan berubah menjadi penyelesaian konflik dengan militer saat menyelesaikan konflik Tamil. Serta Pakistan yang menjalankan demokrasi berbasis Islam juga belum mampu dalam melakukan keadilan terhadap masyarakatnya, diskriminasi terjadi baik di bidang sosial, ekonomi hingga masalah budaya seperti bahasa. Tampak bahwa politik, agama dan ras memanglah menjadi kekuatan besar dalam mengatur jalannya kehidupan masyarakat dan bernegara di kawasan Asia Selatan.

Memang dampak ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kehidupan umat beragama di India sejak pasca merdekanya India dari Inggris hingga sekarang ini. Ummat Sikh yang esensi agamanya memadukan Hindu dan Islam terkadang memiliki konflik dengan jemaat Islam dan Hindu, konflik-konflik ini menghasil kotak-kotak komunitas beragama Sikh yang sudah mulai menyebar di India bahkan perlahan ke kawasan Asia Selatan lainnya. India sekarang diwarnai dengan diskriminasi umat beragama terutama pada kalangan Hindu yang sekarang minoritas terhadap umat Islam yang sekarang menjadi minoritas dan tek memiliki kekuatan yang besar lagi pasca keruntuhan politik kekuasaan Dinasti Mughal.

Konflik sosial dan umat beragama di Asia Selatan juga tak bisa lepas dari kepentingan politik beberapa tokoh atau dari negara itu sendiri. Seperti kita pelajari dari kasus konflik India-Pakistan pada perebutan wilayah Kashmir. Kashmir sendiri merupakan bagian dari wilayah *Indian Princely States* sehingga diberi hak untuk memilih bergabung

Dilansir dari Republikas.id untuk kawasan Sri Lanka sendiri, muslim juga

pada India atau Pakistan. Kashmir saat itu pada tahun 1947 dipimpin oleh seorang Hindu bernama Hari Singh memutuskan Kashmir bergabung dengan India, masyarakat Kashmir yang mayoritas muslim sendiri diketahui tidak ditanyakan pendapat mengenai hal ini sehingga menimbulkan gejolak dari masyarakat Kashmir dan Paksitan. Pada tahun 2016-2019 sendiri mencatat banyak terjadi pemberontakan bersenjata dari masyarakat Kashmir atau beberapa militan Paksitan yang menginginkan Kashmir keluar dari India. Baik masing-masing India dan Paksitan keras dengan argumennya masing-masing dalam perebutan wilayah Kashmir ini (Mukti, D. A. & Puspitasari, A., 2020: 103-104).

Melihat konflik Kashmir, hal serupa juga terjadi di India dalam konteks persoalan konflik umat Hindu dan Islam di India. Berangkat dari sejarah, beberapa raja setelah masa Akbar yang memiliki sifat semena-mena terhadap umat Hindu juga menimbulkan persoalan di masa mendatang seperti yang dialami India sekarang ini. Kelemahan penerapan nilai keislaman pada Sultan Akbar juga dinilai memberikan sumbangsih pada konflik yang terjadi saat ini di India. Sultan Akbar yang terlalu larut dalam toleransi, menikah dengan bangsawan Hindu, dan beberapa kelonggaran yang berlebihan terutama dalam konsepo keagamaan mmebuat Islam yang menjadi identitas Mughal saat itu seolah-olah tidak memiliki "pamor" sebagai kelompok yang memiliki kekuatan, maka tak heran apabila komunitas Hindu juga aman dalam berbagai gerakannya dan umat Islam sendiri terepcah karena kontroversi kebijakan Sultan Akbar di masa lampau (Febriyanto, S. A., 2020:103-104). Perlu ditekankan bagaimana sebenarnya Allah memang menciptakan perbedaan supaya kita saling mengenal, tapi kita tetap memiliki batasan antara perbedaan tersebut.

mengalami beberapa kesulitan dalam menjalan aktivitasnya. Muslim sendiri

komunitasnya sudah terbentuk sejak Islam memasuki Sri Lanka, namun mulai luluh lantak saat Portugis menginvasi pulau ini pada awal abad ke-16 M. Muslim Sri Lanka kini menjadi kaum minoritas dengan persentase 8% dari jumlah penduduk dan terbagi menjadi 3 kelompok: Muslim Sri Lanka Moors yang mewakili 93% populasi muslim Sri Lanka, dan sisanya yaitu Muslim India yang bermigrasi ke sini saat masa penjajahan dan Muslim Melayu yang berasal dari Indonesia dan Malaysia saat masa-masa kekuasaan Inggris dan Belanda di negara tersebut.

Dilansir dari Serambi News elain konflik antara pemerintah Sri Lanka yang bermayoritas Buddha dengan kelompok separatis Tamil (Hindu) dari tahun 1983 hingga tahun 2009, pada tahun 2012 juga lahir gerakan Bodu Bala Sena (BBS) yang bertujuan untuk membela agama Buddha dan nasionalisme orang Sinhala atas segalanya, dan mereka khawatir akan kebangkitan kelompok minoritas, termasuk juga Islam. Perepecahan dilakukan pertama kali pada tahun 2014 oleh kelompok BBS yang merampok dan memakan korban jiwa beberapa penduduk muslim, dan dibalas oleh kelompok Muslim pada tahun 2018 dengan menyerang vihara-vihara Buddha di Distrik Kandy. Golongan ekstremis seperti Jamaah Tauhid Internasional juga memanfaatkan kisruh ini untuk menyebarkan paham radikalisme mereka, sehingga hal ini dibalas dengan aktivis agama Buddha yang menyorakkan penolakan pembangunan masjid dan sertifikat halal. Dilansir dari Tirtoid Minoritas Kristen sendiri juga banyak mendapati kasus diskriminasi oleh Bikkhu Buddha saat mereka melakukan ibadah pada hari Minggu. Dilansir dari Serambinews.com kekerasan terhadap umat kristen juga diperparah dengan pemboman yang dilakukan ekstremis ISIS terhadap gereja-gereja di Sri Lanka saat perayaan Paskah 21 April 2019.

Dilansir dari CNN Indonesia perkembangan konflik umat beragama ini terus berlanjut. Hingga Maret 2021, Menteri Keamanan Publik Sri Lanka Sarath Weerasekera telah menyetujui pelarangan pemakaian *burqa* dan akan menutup 1000 madrasah dengan alasan keamanan nasional dan melanggar kebijakan pendidikan nasional. Sebenarnya jika kita lihat langkah ini justru dapat memperkeruh suasana konflik disana, karena bisa jadi ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal ini untuk perpecahan, sehingga tidak semua dari kalangan satu kelompok ini disalahkan begitu sahaja.

Konflik-konflik politik yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan umat beragama di Asia Selatan memicu ketegangan tersendiri hubungan bernegara di Asia Selatan. Terutama konflik India-Pakistan sendiri memicu negara-negara Asia Selatan yang disibukkan masalah sosial dalam negeri mereka, juga waspada dengan kondisi tetangga mereka. Sehingga hubungan diplomasi, politik dan militer mereka lebih ditekankan pada negara luar kawasan ini dan saling curiga dan waspada terhadap negara-negara lain di Asia Selatan. Contoh saja Bangladesh menjadi salah satu negara yang memiliki peningkatan kapabilitas militernya selama beberapa tahun terakhir. Terbukti pada tahun 2019 menurut *Global Fire Power* Bangladesh menempati posisi ke-45 dan naik 11 tingkat dari tahun 2018. Sehingga Bangladesh menjadi negara ketiga dengan kapabilitas militer terkuat di Asia Selatan. Pada tahun 2018, Sri Lanka juga bekerja sama dengan Rusia dalam memperkuat militer mereka. Afghanistan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menunjang kekuatan keamanan dalam negaranya. Sedangkan Bhutan karena hubungan historis yang erat dengan India bekerja sama dalam menjaga keamanan negaranya. Bhutan hanya memiliki 75.000 personel dan dua pesawat dengan anggaran \$10 million. India bertanggung jawab dengan kekuatan angkatan udara Bhutan dengan memberikan pertolongan

terhadap pasokan senjata, pelatihan militer bahkan pertahanan udara Bhutan. Konflik India-pakistan juga menimbulkan persepsi pada negara lain kawasan Asia Selatan akan ras atidak eprcaya dan curiga dengan kekuatan India yang bisa ikut mencampuri urusan internal negara lain. Sri Lanka merupakan negara yang paling tidak mempercayai India dan Paksitan (Mukti, D. A. & Puspitasari, A., 2020:111-112). Bisa dikatakan, selama tidak mempunyai musuh bersama dari luar atau *common external threat*, sehingga mereka lebih terfokus saling curiga sesama tetangga ketimbang bekerja sama menjaga kawasan Asia Selatan dari kekuatan luar kawasan ini (Putri, T. S. Hd., 2019:193).

Terdapat usaha penyatuan yang dilakukan oleh negara-negara Asia Selatan, salah satunya dnegan membentuk SAARC. Pembentukan organisasi ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak Konferensi New Delhi (1947), Konferensi Baguio (1950) dan Konferensi Colombo, namun belum ada tindak lanjutnya hingga tahun 1980. Pendirian SAARC baru terealisasi ketika presiden Bangladesh bernama Ziaur Rahman mengajukan proposal kerja sama pada 2 Mei 1980. Presiden Ziaur Rahman mengajak negara-negara Asia Selatan untuk membentuk kerja sama ekonomi atas dasar kesaudaraan, baik karena geografis, maupun latar belakang sejarah dan atas keberagaman itu sendiri. Dilansir dari Kompas.com pendirian SAARC dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang memang sulit untuk berkembang secara optimal, baik karena kesulitan sumber daya yang berkualitas, kecuali India yang jauh dalam kondisi lebih baik, serta rendahnya kemampuan dalam mengelola kekayaan sumber daya alam dengan baik. Dalam praktiknya, terkadang masih terdapat beberapa *on and off* dalam hubungan yang terjalin antara negara-negara kawasan Mayoritas Hindu yang sangat ramah muslim di Asia Selatan.

Asia Selatan, yang tentu karena konflik yang berkepanjangan ini.

Kesimpulan

Tak dapat dipungkiri memang kebergaaman itu sendiri menjadi salah satu sumber kebahagiaan atau permasalahan pada suatu kelompok atau negara. Seperti yang dialami beberapa negara di Asia Selatan, perbedaan ideologi politik, tindakan diskriminasi rasial dan agama memicu terhadap adanya perselisihan. Kejayaan Dinasti Mughal sendiri tak mampu bertahan karena isu perbedaan yang terlampau dipahami secara dangkal oleh Sultan-sultan Mughal yang terjebak dalam toleransi, sehingga menimbulkan perpecahan umat muslim Mughal dan mulai menguatnya peranan Hindu ditambah saat penjajahan Kolonial Barat di Asia Selatan yang lebih menguntungkan umat non-muslim.

Kehidupan kemajemukan Asia Selatan masih diwarnai konflik SARA yang masih banyak ditemui di India dan Sri Lanka, dimana posisi umat Islam khususnya terus mengalami diskriminasi yang di atasnamakan demi kepentingan keamanan sosial, politik dan tuduhan terorisme dan radikalisme. Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan selain dipusingkan dengan kewas-wasan mereka terhadap India, juga dihadapi dengan persoalan sosial, ekonomi dan politik dalam negerinya. Terdapat hubungan yang bersifat saling mencurigai pada negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan Afghanistan. Di sisi lain, Maladewa terus menjalani hidup tenang dengan 100% perjalanan masyarakat muslim. Bhutan dan Nepal yang terapit China-India juga memiliki nilai toleransi beragama yang baik, walau belum mendapatkan izin berdakwah di Bhutan, kondisi umat Muslim Bhutan cukup terjaga. Nepal sendiri sekarang merupakan

Daftar Pustaka

- Abdullah, MH Said. *Membangun Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Taman Pustaka, 2006.
- AG, Muhaimin. *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Ahmad Amin, Husayn. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Alif Febriyanto, Satrio. "Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Volume 4 Nomor 2 Januari 2021.
- Auliahadi, Arki. "Sejarah Lahirnya Negara Bangladesh", *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 02 No. 01, Januari-Juni 2018.
- Auliahadi, Arki. "Sejarah Perjuangan Sheikh Mujiburrahman dan Lahirnya Negara Pakistan", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* Volume VIII Nomor 16 Juli-Desember 2018.
- Ayuwanda Mukti, Demita & Anggun Puspitasari. "Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada tahun 2016-2019", *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* Vol. 4 No. 2 2020.
- CNN Indonesia, "Alasan Keamanan, Sri Lanka Larang Burka dan Tutup Madrasah", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210315091156-113-617436/alasan-keamanan-sri-lanka-larang-burkak-dan-tutup-madrasah>, 15 Maret 2021.
- Faidi, Ahmad. "Akulturasi Budaya Islam dan India: Tinjauan Historis terhadap Dialektika Kebudayaan Islam di India", *WARISAN: Journal of History and Cultural Heritage* Volume 1 Issue 2 Agustus 2020.
- Fisher, Simon. *Manajemen Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, 2000.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press, 1986.
- Kartini, Indriana. "Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, dan Islam di Turki", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 9 No. 1 2012.
- Kompas.com, "SAARC: Pembentukan, Tujuan dan Program Kerja", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/13/144537969/saarc-pembentukan-tujuan-dan-program-kerja>, 13 Desember 2020.
- L. Eposito, John. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2002.
- Merdeka.com, "Berjuang Ucapkan Syahadat, Muslim di Nepal Kini Berjaya", <https://www.merdeka.com/dunia/berjuang-ucapkan-syahadat-muslim-di-nepal-kini-berjaya-laporan-dari-nepal.html>, 5 Mei 2015.
- Nuriah Erwin, Tuti. *Asia Selatan dalam Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Nyoman End Triana Gayatri, Nyoman dkk. "Strategi Pemerintah Sri Lanka dalam Menangani Kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 1 No. 1 2018.
- PikiranRakyat.com, "Nepal Nyatakan Masjid Sebagai Simbol Toleransi Beragama di Negeranya", <https://www.pikiran-rakyat.com/khazanah-islam/pr-011102059/nepal-nyatakan-masjid-sebagai-simbol-toleransi-beragama-di-negeranya>, 13 Desember 2020.
- Rasyid, Sorayah. "Dunia Islam: Posisi dan Problematika Umat Islam di Asia Selatan, Mazhab dan Solusinya", *Jurnal Adabiyah* Vol. X Nomor 2 2010.
- Republika.id, "Sejarah Panjang Islam di Maladewa", <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/08/30/ovhxwv313-sejarah-panjang-islam-di-maladewa>, 30 Agustus 2017.
- Republika.id, "Muslim Bhutan Tak Diizinkan Berdakwah", <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/02/27/p4sgp4313-muslim-bhutan-tak-diizinkan-berdakwah>, 27 Februari 2018.
- Republika.id, "Sejarah Panjang Islam di Sri Lanka",

April 2018.

- <https://www.republika.co.id/berita/p6nhl4313/sejarah-panjang-islam-di-sri-lanka>, 4
Republika.id, "Maladewa, Formalisasi Syariat dan Islamisasi Lewat Budaya",
<https://www.republika.co.id/berita/qbck8x320/maladewa-formalisasi-syariat-dan-islamisasi-lewat-budaya>, 3 Januari 2020.
- Republika.id, "Islam di Nepal, Minoritas yang Berjasa di Bawah Rezim Hindu",
<https://republika.co.id/berita/qj53t9320/islam-di-nepal-minoritas-yang-berjasa-di-bawah-rezim-hindu>, 2 November 2020.
- Serambinews.com, "Umat Islam di Sri Lanka",
<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/06/umat-islam-di-sri-lanka>, 6 Juli 2019.
- Schulberg, Lucille dkk. *India yang Bersejarah* (Terjemahan oleh Tira Pustaka, dengan judul asli *Historic India*). Jakarta: Tira Pustaka, 1983.
- Supardi. "Perkembangan dan Peninggalan Dinasti Moghul di India 1525-1857", *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* Vol. 7 No. 1 2008.
- Tirto.id, "Sri Lanka yang Terus Koyak karena Konflik SARA", <https://tirto.id/sri-lanka-yang-terus-koyak-karena-konflik-sara-dm8n>, 29 April 2019.
- Tri Sintia Hd Putri, Tri. "Analisis Teori Fungsionalisme pada Integrasi Kawasan Asia Selatan (Studi Kasus Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir)", *Jurnal Sentris KSMPMI* Vol. 1 2019.
- Zayn Qadafy, Mu'ammarr. "Peradaban Islam di India-Pakistan", *Al Murabbi* Vol.1 No. 2 Januari-Juni 2015.